

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PERTAMBANGAN
BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**



Diajukan oleh :

SARAH ULLY PUSPITA RANA

NPM	:	160512311
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN TAMBANG SEBAGAI AKIBAT
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan oleh :

Sarah Uly Puspita Rana

NPM : 160512311
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 26 September 2020**

Dosen Pembimbing

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN TAMBANG SEBAGAI AKIBAT
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2020
Tempat : Sleman**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,
LL.M
Sekretaris : Linda, S.H., M.KN
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H.,
LL.M**

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hikmat dan pengertian yang diberikan serta penyertaanNya yang tiada putus, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Batu Kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, situasi dan kondisi yang menyertainya. Namun penulis berharap meski sedikit tapi dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Penulisan skripsi ini tentu tidak bisa selesai tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu tentang hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing akademik dari semester awal hingga akhir, yang selalu sabar dan memberikan nasehat yang baik.

4. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar, telaten, dan pengertian serta menyediakan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi, memberikan bimbingan, dan semangat.
5. Bapak Joko Untoro S.T selaku Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang P4LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Bapak Benidiktus Sihotang S.TP., Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang P4LH, Bapak Hari Sugiharjo S. Hut Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Ibu Erna Ismawarsih SP.M.Eng seksi Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Bapak Abas Sumarno Direktur Area dari PT. Anindya Mitra Internasional dan Ibu Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H., M.P.A., Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen, beserta karyawan, staff, dan CS Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, bantuan dan pelayanan yang sangat baik.
7. Bapak dan Mama sebagai orang tua dan kakakku, Mas Yosu yang sudah memberikan cinta, kasih sayang, doa, serta dukungan yang diperlukan kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis, Risna, Desi, Karina, Elis, Sesa, Erika, Eci yang selalu memberikan dukungan, berbagi cerita, pengalaman dan kasih kepada penulis. Teman-teman dari Angkatan Tua, Teman Kerja Kelompok, PLKH dan teman-teman seperjuangan skripsi maupun teman kuliah yang sudah menemani, berbagi cerita, sekaligus pengalaman dengan penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
9. Yang terkasih Albert Julian Ang, terimakasih telah selalu ada, memberikan cinta, kasih, doa, serta dukungan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman dan orang-orang dari Kos Petung 36 yang telah memberikan bantuan, maupun menghibur dikala penulis butuhkan.
11. Keluarga Mama dan Bapak yang sudah mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis agar dapat bertumbuh menjadi lebih baik.
12. Keluarga Komisi Pemuda GKJ Wonosari yang sudah membantu saya agar dapat bertumbuh dan mendoakan dari jauh.

Penulisan skripsi ini didedikasikan bagi semua orang yang telah hadir dalam hidup penulis yang memberikan pelajaran hidup yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu serta bagi orang-orang yang merasa penting untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan batu kapur. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan yang ditemui pada skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk menyempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga penulisan skripsi

ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan menjadi ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan.

Yogyakarta, 21 September 2020

Penulis

Sarah Ully Puspita Rana



Abstract

The purpose of this legal research is to analyze how the role of the Department of Environment in controlling environmental damage. This type of legal research used is empirical legal research. The data collection technique was carried out by interviewing informants and respondents. The resource persons for this research were the Environmental Agency and PT Anindya Mitra Internasional. Respondents of this research are the Department of Investment and Integrated Services. The results showed that the Environmental Agency has played a controlling role through the fields of licensing, supervision and land conservation. However, in this implementation there were obstacles from the surrounding community, the miners, and the Environmental Service itself. Constraints from the Environmental Service include limited authority, human resources, and funds. Therefore, the role of the Environmental Service has not been maximized in controlling environmental damage due to limestone mining in Ponjong District, Gunungkidul Regency.

Keywords: limestone mining, environmental control, agency

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Cara Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Responden & Narasumber.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II.....	16
A. Tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup	16
1. Dasar Hukum	16
2. Visi Misi	16
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan	19
B. Pertambangan Batu Kapur dan Kerusakan Lingkungan.....	22
1. Pengertian Pertambangan Batu Kapur	22
2. Perizinan Pertambangan.....	25
3. Kerusakan Lingkungan.....	39
C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur .	44
1. Potensi Mineral Tambang Kabupaten Gunungkidul	44
2. Dampak Pertambangan Batu Kapur	45

3. Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan	50
4. Kendala Yang Dihadapi	58
BAB III.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain, maka akan diberikan sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta 25 September 2020

Yang menyatakan,



Sarah Uilly Puspita Rana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam tambang yang dapat dikembangkan diberbagai daerah seperti potensi tambang minyak, batu bara, mineral, dan batuan. Ahli pertambangan dan mantan direktur Ahli Pertambangan yang juga mantan Direktur Teknik Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Mangantar S. Marpaung mengutarakan bahwa kegiatan pertambangan tentunya memberikan kontribusi bagi daerah dimana dampak yang secara langsung dirasakan adalah diperolehnya royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), retribusi, sewa lahan, pajak badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak pribadi dan pajak efektif. Selain itu, kata Mangantar, ada juga penerimaan tidak langsung yaitu bertumbuhnya perusahaan supplier, perusahaan jasa¹.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, baik yang dilakukan pengusaha domestik maupun penanaman modal asing ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang, meliputi :

¹ Benny Pasaribu, Ini Keuntungan Hadirnya Tambang bagi Daerah dan Negara, medanbisnisdaily.com, diakses pada 27 Februari 2020

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya ekonomi masyarakat;
4. Menampung tenaga kerja lokal;
5. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur.²

Di Indonesia salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi pertambangan yang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di golongan ke dalam mineral yang berupa batuan. Batuan tersebut berupa batu kapur yang terdapat di Kecamatan Ponjong. Batu kapur memiliki banyak manfaat salah satunya untuk campuran dalam pembuatan semen, membangun rumah maupun campuran bahan bangunan lainnya. Selain itu batu kapur juga digunakan untuk bahan keramik dan keperluan industri lainnya.

Potensi pertambangan tersebut tentunya mengundang para investor baik dari daerah maupun luar daerah untuk ikut berinvestasi di sektor pertambangan batu kapur ini, dengan berkembangnya sektor pertambangan batu kapur tersebut tentunya menguntungkan bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pertambangan batu kapur menambah pendapatan asli daerah, sedangkan bagi masyarakat sekitar terbuka lapangan pekerjaannya.

² H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 72.

Kendati demikian kegiatan pertambangan tentunya tidak lepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa kegiatan pertambangan seharusnya tidak boleh merusak lingkungan, namun tidak sedikit kerusakan lingkungan yang muncul akibat kegiatan pertambangan batu kapur. Salah satunya yang terjadi, kegiatan pertambangan batu kapur ini berdampak pada kondisi air bawah tanah dan ekosistem sekitarnya. Menurut IR Pramudji Ruswandono, M.Si, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gunungkidul kepada Mongabay Indonesia, selama ini Gunungkidul termasuk dalam Kawasan Karst Gunungsewu telah memenuhi kebutuhan air baku bagi 120.000 jiwa. Selain itu, kawasan karst merupakan lokasi *akuifer* air yang baik, dan berpengaruh langsung pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Konsep *epikarst* di katakan bahwa lapisan batu gamping yang ada di dekat permukaan karst memiliki kemampuan menyipam air dalam kurun waktu yang lama.³ Selain itu lahan bekas tambang juga masih ada beberapa yang terbengkelai dan belum dilakukan restorasi, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pemerintah⁴. Pengawasan tersebut dilakukan oleh salah satu dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

³ Tommy Apriando, Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat, Mongabay.co.id diakses pada 4 Mei 2020

⁴ H. Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 80

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan tambang. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan hidup dalam pengawasan kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Meski kini kegiatan pertambangan telah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tetapi persoalan terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini masih kerap terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian, walaupun kegiatan pertambangan batu kapur ini masih tetap berlanjut hingga kini.

Dalam kasus tertentu tidak jarang pula pertambangan yang izin usaha pertambangan telah habis dan belum diperbarui masih tetap melakukan kegiatan pertambangan, sehingga kerusakan lingkungan pun sulit untuk dihindari. Berdasarkan hal tersebut, Peran Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan diharapkan bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dapat lebih tegas lagi.

Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan

tambang sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu kapur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan pengetahuan hukum pertambangan khususnya yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengawasan dan

pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan tambang batu kapur.

- b. Bagi pelaku tambang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku tambang dalam rangka menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan atau pun berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Tambang Sebagai Akibat Pertambangan Batu Kapur Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun memiliki permasalahan hukum yang berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu :

1. Disusun oleh : Randy Farizki
 NPM : 141011268
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Universitas : Universitas Andalas
 Judul : Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang dan apakah

pengelolaan tambang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku serta Standar Operasional Produksi (SOP) yang baik atau tidak?

- b. Bagaimana dampak Pengelolaan Tambang Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang tersebut terhadap lingkungan disekitar lokasi lahan tambang tersebut?

Hasil Penelitian :

- a. Pengelolaan tambang batu kapur bukit karang putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang telah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dengan tujuan untuk tercapainya mutu yang baik dari produk yang dihasilkan, keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.
- b. Kegiatan pertambangan tersebut tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan PT Semen Padang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Disusun oleh : Saddam Surbakti
 NPM : 100510427
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Kawasan Karst Di
 Gunungkidul Yogyakarta

Rumusan masalah:

Bagaimana peran pemerintah pusat khususnya menteri energi sumber daya alam dalam memberi perlindungan bentang alam kawasan karst?

Hasil Penelitian :

Objek lokasi penelitian penulis berada di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 53 ayat (1) b dan pasal 60 ayat (2) f kawasan karst sebagai bentang alam unik adalah kawasan lindung nasional maka tidak bisa diterbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan (IUP). Kemudian dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehingga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya. Namun belum adanya peraturan yang menetapkan wilayah yang menjadi batasan kawasan karst menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan pengelolaan karst.

3. Disusun oleh : Nailatul Khofifi
- NPM : 13220161
- Fakultas : Hukum Bisnis Syariah

Judul penelitian : Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Mashlahah

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana praktik pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
- b. Bagaiman tinjauan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
- c. Bagaimana tinjauan Mashlahah terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?

Hasil Peneltian :

PT. Polowijo yang sudah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 1980an kini telah menggunakan alat yang canggih, menyebabkan perkembangan pesat dalam kegiatan penambangan batu kapur. Perkembangan pesat kegiatan tambang tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, namun PT Polowijo telah mengupayakan dengan menyiram lahan yang terkena debu dengan air tangki. Untuk kegiatan reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan karena pertambangan tersebut masih aktif. Adanya industri pertambangan yang didirikan tersebut telah memashlahatkan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan telah mengubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sektor

pertambangan ke sektor industri. Hal ini juga yang memacu sebagian besar penduduk Sekapuk untuk ikut mengelola area tambang.

Ketiga skripsi yang telah dideskripsikan berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya yang *pertama* lokasi penelitian berbeda dengan yang akan penulis teliti. Kegiatan pertambangan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pengendalian dilakukan oleh pihak penambang dan juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua* peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan karst yang berada di area pertambangan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zonasi kawasan karst. *Ketiga* upaya pengendalian kerusakan tambang dilakukan oleh pihak penambang. Usaha pengendalian kerusakan tersebut belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pertambangan masih berlangsung. Pertambangan tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pihak penambang telah berupaya dengan menyiram lahan yang terkena debu.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penjelasan tentang DLH terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 17 UU PPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

3. Pengendalian

Menurut pasal 13 UU PPLH pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pencegahan (pasal 13); b. penanggulangan (pasal 53); c. Pemulihan (pasal 54).

4. Pertambangan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang memengaruhi perilaku hukum baik personal individual, maupun secara instusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau pun narasumber.
- b. Data sekunder

1.) Bahan Hukum Primer

- a.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- b.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c.) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

⁵Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makasar, hlm 5

d.) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

3.) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁶ Studi lapangan dengan wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam yang terdapat dalam telephone seluler.
- b. Studi kepustakaan setelah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

5. Responden & Narasumber

⁶ Hendryadi, Metode Pengumpulan Data, hlm 3, Academia.edu, diakses pada 17 Maret 2020

Responden :

- a. Bapak Joko Untoro S.T Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengolahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- b. Bapak Benedictus Sihotang STT Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengolahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- c. Bapak Hari Sugiharja S.Hut Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Bapak Abas Sumarno Direktur Area PT. Anindya Mitra Internasional.

Narasumber :

Ibu Sri Rahayu Pratiningsih S.H., M.P.A Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis untuk penelitian hukum empiris ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah

cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus yang menentukan hukum yang umum.





BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah melakukan peran dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat maksimal dalam melakukan perannya, hal ini disebabkan oleh kendala berupa baik dari pihak masyarakat, pihak penambang, maupun dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih melakukan komunikasi dengan para penambang khususnya bagi pertambangan berskala kecil, supaya para penambang dapat memahami dengan baik terkait pemulihan lingkungan. Komunikasi itu sendiri juga dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan secara periodik mengenai pentingnya pemulihan lahan.

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu kapur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- N. M, Splet dan J.B.J.M. Ten Derge, *Pengantar Hukum Perizinna*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makasar
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- , 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Depok
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Depok
- Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jurnal

- Erni, 2014, Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Batu Gunung di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Dedikasi Jurnal Mahasiswa, Vol 2, Universitas 17 Agustus 1945

Nur Khosiah, 2014, “Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografis FIS Unesa*, Vol. 3 Nomor 3, Universitas Negeri Surabaya.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030. Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E. Sekretaris Daerah. Gunungkidul

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 64. Sekrestaris Daerah. Gunungkidul

Internet

- Benny Pasaribu, 2019, Ini Keuntungan Hadirnya Tambang bagi Daerah dan Negara. https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/-2019/03/11/68727/ini_keuntungan_hadirnya_tambang_bagi_daerah_dan_negara/ diakses pada 27 Februari 2020
- Tommy Apriando, 2012, Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat. <https://www.mongabay.co.id/2012/09/19/menghentikan-tambang-karst-gunung-kidul-selamatkan-mata-air-rakyat/> diakses pada 4 Mei 2020.
- Hendryadi, 2014, Metode Pengumpulan Data. https://www.academia.edu/5997638/Metode_Pengumpulan_Data diakses pada 17 Maret 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup, Profil Dinas. <https://lh.gunungkidulkab.go.id/statis-12/profil-dinas.html> diakses pada 21 September 2020.
- Flysh Geost, 2016, Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (Batu Kapur). <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html> diakses pada 7 Juli 2020.
- Parlindungan Sitinjak, 2011, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> diakses pada 14 Maret 2020.
- Elok Dyah Messwati, 2012, 70 Persen Kerusakan Lingkungan Akibat Operasi Tambang. <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang> diakses pada 5 Agustus 2020
- Dedek Hendry, 2017, Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya? <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses pada 5 Agustus 2020.
- Pemkab Gunungkidul, Kondisi Umum. <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> diakses pada 5 Agustus 2020.
- Kelvian Adhi, 2019, Potensi Tinggi, Raupan Pajak Pertambangan Gunungkidul Lampau Target. <https://pidjar.com/potensi-tinggi-raupan-pajak-pertambangan-gunungkidul-lampau-target/19800/> diakses pada 8 Agustus 2020.

Dedy, 2015, 9 Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan.
<https://pontianak.tribunnews.com/2015/09/10/9-dampak-lingkungan-akibat-pertambangan> diakses pada 14 Agustus 2020.

